

Volume 28 Nomor 2, Juli 2023

JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN (JAK)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Indonesia

DISCRETIONARY ALLOWANCE FOR IMPAIRMENT LOSSES PASCA IMPLEMENTASI PSAK 71 DI INDONESIA PADA KELOMPOK BANK BERDASARKAN MODAL INTI (KBMI)Widya Rizki Eka Putri^{1a}, Elizabeth Sugiarto Dermawan^{2b}^{1,2} Pendidikan Profesi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesiawidya.126221061@stu.untar.ac.id^a, elizabethsugiarto@fe.untar.ac.id^b**INFO ARTIKEL****Dikumpulkan:** 17 Juni 2023;**Diterima:** 11 Juli 2023;**Terbit:** 28 Juli 2023;Volume 28 Number 2,
Juli 2023, pp. 183-192<http://doi.org/10.23960/jak.v28i2.1838>**Corresponding author:**

Widya Rizki Eka Putri

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Tarumanegara, Jakarta, Indonesia**Email:**widya.126221061@stu.untar.ac.id**ABSTRACT**

This study aims to provide empirical evidence of differences in Discretionary Allowance for Impairment Losses pre and post of implementation of PSAK 71 in banks in Indonesia and differences in banking Discretionary Allowance for Impairment Losses in each Bank Group based on Core Capital (KBMI). The per-KBMI category can show specific characteristics towards the sustainability of banking operations. There is no research that examines the differences in Discretionary Allowance for Impairment Losses in each category of Bank based on KBMI, so there are no specific results on the Bank's response to the implementation of PSAK 71. This study found significant differences in Discretionary Allowance for Impairment Losses before and after the implementation of PSAK 71 in each Bank Group based on Core Capital (KBMI). The implementation of PSAK 71 encourages earlier and more precise recognition of credit losses, considering credit risk that is more comprehensive so that it requires the Bank's management to establish a reserve fund (Allowance for Impairment Losses). In the process of forming this reserve fund, the professional judgment of the management is getting higher so that the opportunity to carry out earnings management is getting bigger. Significant differences in Discretionary Allowance for Impairment Losses were also found between Bank Groups based on Core Capital (KBMI) after the implementation of PSAK 71. Banks that are at the middle level (KBMI 2 and KBMI 3) and lower levels (KBMI 1) face greater pressure to maintain their credibility when the Financial Services Authority Regulation Number 12 /POJK.03/2021 was issued, while the value of Discretionary Allowance for Impairment Losses at Bank KBMI 4 shows the lowest value of all KBMI.

Keywords: *Discretionary Allowance for impairment losses, Allowance for impairment losses, PSAK 71, IFRS 9.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris perbedaan *Discretionary Allowance for Impairment Losses* sebelum dan setelah implementasi PSAK 71 pada perbankan di Indonesia serta perbedaan *Discretionary Allowance for Impairment Losses* perbankan pada setiap Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI). Kategori per-KBMI dapat menunjukkan karakteristik spesifik dalam menuju keberlanjutan operasional perbankan. Belum adanya penelitian yang mengkaji perbedaan *Discretionary Allowance for Impairment Losses* pada setiap kategori Bank berdasarkan KBMI sehingga belum ada hasil spesifik atas respon Bank terhadap implementasi PSAK 71. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Terdapat perbedaan yang signifikan *Discretionary Allowance for Impairment Losses* sebelum dan setelah implementasi PSAK 71 pada setiap Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI). Implementasi PSAK 71 mendorong pengakuan kerugian kredit secara lebih awal dan lebih tepat, dengan mempertimbangkan risiko kredit yang lebih komprehensif sehingga mengharuskan pihak manajemen Bank membentuk dana cadangan (*Allowance for Impairment Losses*). Dalam proses pembentukan dana cadangan ini, *professional judgement* dari pihak manajemen semakin tinggi sehingga peluang untuk melakukan *earnings management* semakin besar. Perbedaan *Discretionary Allowance for Impairment Losses* yang signifikan juga ditemukan antar Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) setelah implementasi PSAK 71. Bank yang berada pada level menengah (KBMI 2 dan KBMI 3) dan level bawah (KBMI 1) menghadapi tekanan yang lebih besar untuk mempertahankan kredibilitasnya saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2021 diterbitkan, sedangkan nilai *Discretionary Allowance for Impairment Losses* pada Bank KBMI 4 menunjukkan nilai terendah dari keseluruhan KBMI.

Kata Kunci: *Discretionary Allowance for impairment losses, Allowance for impairment losses, PSAK 71, IFRS 9*

A. PENDAHULUAN

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2021 merupakan peraturan tentang Konsolidasi Bank Umum yang mengelompokkan Bank berdasarkan modal inti. Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) sama seperti Bank Umum berdasarkan Kelompok Usaha (BUKU), namun untuk besaran modal inti tiap kelasnya berbeda. Tujuan dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk mendorong perbankan agar lebih berdaya saing, adaptif dan kontributif bagi perekonomian nasional, serta mendorong industri perbankan mencapai level skala ekonomi yang lebih tinggi. Sistem BUKU memberi keterbatasan kepada Bank dalam daftar BUKU 1 dan BUKU 2 yang hanya mencakup wilayah nasional. Layanan yang dapat diberikan terbatas sehingga memperkecil peluang untuk meningkatkan pendapatan dibandingkan dengan Bank yang berada dalam BUKU 3 dan BUKU 4. Bank yang terdaftar dalam BUKU 1 dibatasi dalam membuat produk digital. Hal ini sangat berdampak terutama pada masa pandemi Covid 19 dimana terjadi perubahan peta bisnis Bank ke arah digitalisasi. Pengelompokan Bank dengan KBMI dibagi menjadi empat yaitu: KBMI 1 adalah kelompok Bank yang memiliki modal inti kurang dari Rp6 triliun, KBMI 2 memiliki modal inti Rp6 triliun-Rp14 triliun, KBMI 3 untuk Rp14 triliun-Rp70 triliun, dan KBMI 4 untuk Bank dengan modal inti lebih dari Rp70 triliun. Bank yang tidak mampu memenuhi modal inti sesuai dalam POJK Nomor 12 /POJK.03/2021 sampai dengan akhir tahun 2022 akan berubah status menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Oleh karena itu pengelompokan Bank dengan KBMI dapat menunjukkan karakteristik spesifik dalam menuju keberlanjutan operasional perbankan.

Perubahan peraturan yang diterbitkan oleh OJK memotivasi pihak manajemen untuk meningkatkan kinerja dan menambah modal inti agar dapat mempertahankan posisi Bank dalam KBMI. Salah satu tantangan bagi manajemen perbankan yang harus dihadapi adalah adanya perubahan standar akuntansi keuangan dari PSAK 55 menjadi PSAK 71. Perubahan ini menimbulkan perbedaan yang signifikan dalam hal pembentukan *Allowance for impairment losses (AFIL)* Dalam PSAK 55 pembentukan *Allowance for impairment losses* menggunakan metode *Incurring Loss* dimana *AFIL* diakui ketika nilainya telah mengalami penurunan. Perhitungan ini bersifat *backward looking*, yaitu kewajiban cadangan timbul setelah suatu peristiwa terjadi atau terdapat bukti objektif yang menunjukkan bahwa debitur memiliki risiko gagal bayar, seperti terlambat membayar cicilan kredit (Yusdika, 2021). Jumlah pencadangan yang dialokasikan berdasarkan metode *incurred loss* dinilai terlalu kecil karena apabila terjadi krisis ekonomi global prinsip tersebut menyebabkan perilaku pencadangan piutang kerugian kredit menjadi prosiklikal terhadap siklus bisnis (Arifullah, 2021).

Perbedaan mendasar antara PSAK 55 dan PSAK 71 dalam hal perhitungan *Allowance for impairment losses* adalah pada PSAK 71 diberlakukan metode *Expected Credit Loss* yang bersifat *forward-looking*. Metode tersebut memperhitungkan kemungkinan adanya penurunan nilai di masa mendatang akibat perubahan ekonomi yang berdampak pada risiko kredit. Metode *Expected Credit Loss* mulai diperhitungkan pada saat pemberian kredit diawal (*early recognition*) tanpa harus menunggu adanya kerugian/penurunan nilai (Arifullah, 2021). Adanya perbedaan ini akan memberikan dampak pada penentuan nilai *AFIL* perbankan. Husni et.al (2022) menemukan bahwa implementasi PSAK 71 memberikan dampak signifikan pada laba perbankan BUMN. Metode *Expected Credit Loss* dalam PSAK 71 tetap membutuhkan *professional judgement* manager dalam menentukan *AFIL* sehingga hal ini memperbesar kesempatan manajer untuk melakukan tindakan manajemen laba melalui *Allowance for impairment losses*. Unsur *professional judgement* manager dalam penentuan *AFIL* perbankan menimbulkan bagian *discretionary* di dalamnya. Beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa manager Bank dapat memanfaatkan pembentukan *Allowance for Impairment Losses* untuk mencapai target laba dan tujuan tertentu lainnya (Moyer, 1990; Scholes et al., 1990; Collins et al., 1995).

Adanya tekanan bagi pihak manajemen untuk mempertahankan kredibilitas Bank dan menambah modal inti guna mempertahankan status Bank dalam KBMI bertepatan dengan pemberlakuan PSAK 71 pada perbankan yang mengharuskan Bank membentuk dana *AFIL* yang lebih besar. Pembentukan *AFIL* yang memerlukan *professional judgement* manager memungkinkan peningkatan nilai *Discretionary Allowance for Impairment Losses* pasca implementasi PSAK 71. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian terkait *Allowance for Impairment Losses* karena item ini juga terkait dengan pengawasan mikro-prudensial regulator Bank serta keinformatifan pengungkapan akuntansi dalam laporan keuangan yang dibutuhkan oleh pembuat standar akuntansi. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan *Discretionary Allowance for Impairment Losses* pada setiap kategori Bank sebelum dan setelah implementasi PSAK 71 di Indonesia?

2. Apakah terdapat perbedaan *Discretionary Allowance for Impairment Losses* pada setiap kategori Bank menurut KBMI?

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris perbedaan *Discretionary Allowance for Impairment Losses* sebelum dan setelah implementasi PSAK 71 pada perbankan di Indonesia serta perbedaan *Discretionary Allowance for Impairment Losses* perbankan pada setiap Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) karena kategori per-KBMI dapat menunjukkan karakteristik spesifik dalam menuju keberlanjutan operasional perbankan. Belum adanya penelitian yang mengkaji perbedaan *Discretionary Allowance for Impairment Losses* pada setiap kategori Bank berdasarkan KBMI sehingga belum ada hasil spesifik atas respon Bank terhadap implementasi PSAK 71. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa: Pertama, salah satu pertimbangan bagi dewan standar akuntansi untuk menerbitkan standar akuntansi yang bersifat preventif terhadap manipulasi laba pada perbankan. Kedua, kontribusi bukti empiris bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengevaluasi kebijakan perubahan pengelompokan Bank di Indonesia berdasarkan modal inti.

B. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Agency Theory

Agency Theory merupakan teori yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling pada tahun 1976. Teori yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* selaku pemilik dan agen sebagai manajer. Manajemen merupakan pihak yang didelegasikan oleh pemegang saham untuk mengelola dan bekerja demi kepentingan pemegang saham. Masalah keagenan terjadi ketika adanya asimetri informasi yang memungkinkan muncul adanya konflik kepentingan antara *principal* dan agen. Agen yang memiliki informasi lebih atas perusahaan memiliki peluang untuk bertindak oportunistik demi keuntungan pribadinya. Literatur manajemen laba dan modal menekankan masalah keagenan yang muncul dari asimetri informasi antara Bank, investor ekuitas dan regulator yang memiliki implikasi untuk pelaporan keuangan dan ketentuan kerugian pinjaman (Beatty dan Liao, 2011; Bushman dan Williams, 2012)

Allowance for Impairment Losses

Ozili dan Outa (2017) mengemukakan bahwa *Allowance for Impairment Losses (AFIL)* merupakan akrual diskresioner yang tersedia bagi manajer Bank secara signifikan, karena *AFIL* berdampak langsung pada margin bunga Bank sehingga mempengaruhi pendapatan secara keseluruhan. Keberadaan unsur *discretionary accrual* dalam nilai *Allowance for Impairment Losses* menjadikan nilai *discretionary Allowance for Impairment Losses (DAFIL)* sebagai dasar pengukuran manajemen laba pada perbankan. *AFIL* sejauh ini merupakan akrual paling kritis yang disesuaikan oleh Bank (Kanagaratnam et al. 2003; Beatty dan Liao 2014) dan umumnya memiliki hubungan yang kuat terhadap laba bersih dan modal ekuitas (Healy dan Wahlen 1999). Penentuan nilainya yang sangat tergantung pada penilaian manajer, *AFIL* dapat mencerminkan asimetri informasi. Pengembangan model pengukuran manajemen laba melalui *AFIL* pada industri perbankan telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Model berbasis *specific accruals*, yaitu pendekatan yang menghitung akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item laporan keuangan tertentu dari industri tertentu dikembangkan oleh Beaver dan Engel (1996), Beneish (1997), Beaver dan Mc Nichols (1998) serta Kanagaretnam et al. (2004). Seiring berkembangnya zaman dan perubahan iklim ekonomi dunia, model pengukuran manajemen laba melalui *Allowance for Impairment Losses* juga mengalami perkembangan. Model yang dikembangkan oleh Beatty dan Liao (2014) memasukkan ukuran perusahaan, perubahan *Gross Domestic Product (GDP)* serta perubahan persentase *unemployee* pada suatu negara ke dalam model pengukurannya. Model ini bertujuan untuk memisahkan *Allowance for Impairment Losses* yang mencerminkan kinerja fundamental Bank yang normal dengan lebih baik dari *Discretionary Allowance for Impairment Losses* yang disebabkan oleh kebijaksanaan manajerial. Porsi *AFIL* yang tidak dapat dijelaskan (*DAFIL*) mencerminkan tingkat manajemen laba pada perbankan. Semakin tinggi nilai *DAFIL* maka semakin tinggi tingkat manajemen laba yang terjadi.

Pengembangan Hipotesis

Perubahan sistem pengelompokan Bank Umum yang sebelumnya berdasarkan kelompok usaha menjadi berdasarkan modal inti yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2021 menjadi tantangan besar bagi perbankan. Pengelompokan Bank Umum berdasarkan modal inti mensyaratkan Bank memiliki modal inti yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Upaya Bank dalam menambah modal inti dapat dilakukan melalui penerbitan saham baru, menggelar *right issue* maupun *Initial Public Offering*. Dalam upaya ini, Bank akan berusaha

untuk menunjukkan kinerja terbaiknya. Pemberlakuan PSAK 71 yang mengharuskan pembentukan dana *AFIL* berdasarkan *Expected Credit Loss* dapat menjadi celah bagi manajemen untuk melakukan tindakan manajemen laba melalui pembentukan *Allowance for Impairment Losses*.

Ng et al. (2020) dan Jin et al. (2016), meneliti dampak kebijakan pada *AFIL* dan menemukan bahwa Bank menyisihkan *AFIL* yang lebih tinggi pada saat ketidakpastian kebijakan yang lebih tinggi. Asimetri informasi yang disebabkan oleh meningkatnya ketidakpastian terkait kebijakan ekonomi, akan direspon oleh Bank dengan mengantisipasi peningkatan gagal bayar dan menetapkan banyak akrual *AFIL* (Chi dan Li, 2017; Bushman dan Williams, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2017) menemukan bahwa terdapat perbedaan signifikan *AFIL* sebelum dan setelah implementasi standar akuntansi adopsi *IFRS* pada perbankan Indonesia, selain itu *AFIL* dibuktikan berpengaruh negative terhadap laba setelah implementasi PSAK 71 Putri, et al (2022). Puspita et.al (2022) menemukan bahwa *interestbased income* mampu bertahan pada masa pandemi. Hal ini memperkuat motivasi manajer untuk melakukan manajemen laba demi mempertahankan status Bank dalam KBMI melalui celah *AFIL* karena turunnya status Bank akan mempengaruhi pendapatan Bank akibat perbedaan layanan yang dapat diberikan dalam setiap kategori KBMI. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

- Ha1: Terdapat perbedaan signifikan *Discretionary Allowance for Impairment Losses* sebelum dan setelah implementasi PSAK 71 pada perbankan kategori KBMI 1
- Ha2: Terdapat perbedaan signifikan *Discretionary Allowance for Impairment Losses* sebelum dan setelah implementasi PSAK 71 pada perbankan kategori KBMI 2
- Ha3: Terdapat perbedaan signifikan *Discretionary Allowance for Impairment Losses* sebelum dan setelah implementasi PSAK 71 pada perbankan kategori KBMI 3
- Ha4: Terdapat perbedaan signifikan *Discretionary Allowance for Impairment Losses* sebelum dan setelah implementasi PSAK 71 pada perbankan kategori KBMI 4

Pengelompokan Bank berdasarkan modal inti mencerminkan keberlanjutan operasional Bank dimasa yang akan datang. Penelitian yang dilakukan oleh Husni et.al (2022) menemukan bahwa implementasi PSAK 71 memberikan dampak yang berbeda pada Bank BUMN. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Rizal dan Shauki (2019) menemukan bahwa terjadi kenaikan nilai *AFIL* sehingga mempengaruhi modal pada bank *early adopter* PSAK 71. Witjaksono (2017) menemukan bahwa implementasi PSAK 71 berpengaruh terhadap penurunan *CAR* pada bank dalam kategori BUKU 2. Perbedaan modal inti Bank dapat mempengaruhi kesiapan Bank dalam merespon implementasi PSAK 71. Bank yang sebelumnya terdaftar pada BUKU 1 dan 2 akan berusaha menunjukkan kinerja yang baik untuk mendapatkan tambahan modal inti sehingga dapat mempertahankan posisinya pada saat sistem pengelompokan KBMI diberlakukan. Sedangkan Bank yang sebelumnya berada dalam BUKU 3 dan 4 cenderung lebih siap dalam menghadapi perubahan standar sehingga dapat memungkinkan untuk melakukan antisipasi awal. Situasi ini dapat menyebabkan perbedaan respon Bank dalam pemanfaatan *AFIL* pada setiap kategori. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

- Ha5: Terdapat perbedaan signifikan *Discretionary Allowance for Impairment Losses* pada setiap kategori KBMI.

C. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Sampel dari penelitian ini adalah seluruh Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018 – 2021. Data keuangan diperoleh dari *Annual Report* Bank yang dipublikasikan. Selanjutnya pengelompokan sampel Bank berdasarkan modal inti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Pengelompokan Bank berdasarkan Modal Inti

Kelompok	Modal Inti	Jumlah
KBMI 1	< 1 Triliun	24
KBMI 2	6 – 14 Triliun	6
KBMI 3	14 – 70 Triliun	6
KBMI 4	70 Triliun <	4
Total Sampel		40
Toal Tahun amatan		4

Sumber: Data diolah (2022)

Operasional Variabel

Pengukuran variabel *Discretionary Allowance for Impairment Losses* sebagai proksi dari *earnings management* dalam penelitian ini menggunakan model yang dikembangkan oleh Beatty dan Liao (2014). Model ini bertujuan untuk memisahkan *Allowance for Impairment Losses* yang normal dengan lebih baik, sehingga dapat memisahkan kinerja fundamental Bank dari *Discretionary Allowance for Impairment Losses* yang disebabkan oleh kebijakan manajerial. Model ini sangat sesuai dengan situasi ekonomi saat ini dimana periode penelitian dilakukan pada saat pandemi Covid 19 yang mengakibatkan krisis ekonomi di Indonesia dan meningkatkan potensi gagal bayar atas kredit. Oleh karena itu beberapa faktor baru masuk dalam pengukuran model. Model pengukuran yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$AFIL_t = \alpha + \beta_1 \Delta NPL_{t+1} + \beta_2 NPL_t + \beta_3 \Delta NPL_{t-1} + \beta_4 \Delta NPL_{t-2} + \beta_5 SIZE_t + \beta_6 \Delta LOAN_t + \beta_7 CO + \varepsilon_t$$

Keterangan :

AFIL _t	=	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang tahun t dibagi Total Loan tahun t
ΔNPL _{t+1}	=	Non Performing Loan tahun t dengan t+1 dibagi Total Loan tahun t
NPL _t	=	Non Performing Loan (kredit yang bermasalah) tahun t. Kredit yang bermasalah terdiri terdiri dari kredit yang diberikan yang berdasarkan tingkat kolektibilitasnya digolongkan menjadi (a) dalam perhatian khusus, (b) kurang lancar, (c) diragukan, dan (d) macet dibagi Total Loan tahun t
ΔNPL _{t-1}	=	Selisih Non Performing Loan tahun t dengan t-1 dibagi Total Loan tahun t
ΔNPL _{t-2}	=	Selisih Non Performing Loan tahun t dengan t-2 dibagi Total Loan tahun t
SIZE _t	=	Ln Total Asset
ΔLOAN _t	=	Selisih Total Loan tahun t dengan t-1 dibagi total Loan tahun t
CO	=	Charge Off (penghapusan piutang) tahun t Total Loan tahun t

Pengujian hipotesis pertama hingga hipotesis keempat dalam penelitian ini menggunakan *paired sample t test* untuk menguji perbedaan *Discretionary Allowance for Impairment Losses* sebelum dan setelah implementasi PSAK 71 pada setiap kategori bank dalam KBMI. Sedangkan hipotesis kelima diuji menggunakan pengujian *One Way ANOVA* untuk melihat perbedaan *Discretionary Allowance for Impairment Losses* pada setiap kategori bank dalam KBMI. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif yang dilakukan pada awal periode implementasi PSAK 71 dan POJK Nomor 12 /POJK.03/2021 sehingga data yang tersedia masih terbatas. Oleh karena itu sebagai permulaan untuk memvalidasi teori yang ada, pengambilan keputusan hipotesis dalam penelitian ini menggunakan nilai signifikasnsi 10% untuk memperluas peluang menemukan perbedaan *Discretionary Allowance for Impairment Losses* sebelum dan setelah implementasi PSAK 71 pada setiap kategori bank dalam KBMI dan perbedaan *Discretionary Allowance for Impairment Losses* pada setiap kategori bank dalam KBMI.

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Distribusi data terhadap komponen pengukuran *Allowance for Impairment Losses* serta hasil perhitungan *Discretionary Allowance for Impairment Losses* atas seluruh kelompok Bank selama tahun 2018 – 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Bank Group		AFIL	NPL _{t+1}	NPL _t	NPL _{t-1}	NPL _{t-2}	size	ΔLOAN _t	CO	DAFIL
KBMI 1	Min	-0,55	-13,02	,00	-,62	-19,32	27,49	-55,08	,00	-,10
	Max	,03	,12	,22	,15	,14	35,13	5,06	1,00	,07
	Means	-0,356	-,1344	,0385	-,0046	-,2031	30,2280	-,5689	,0546	-,0050
KBMI 2	Min	-,09	-,04	,01	-,04	-,05	31,02	-,28	-,03	-,03
	Max	,00	,04	,08	,04	,05	32,89	,52	,25	,00
	Means	-,0281	,0003	,0280	,0031	,0064	31,9883	,0704	,0258	-,0094
KBMI 3	Min	-,07	-,02	,01	,01	-,02	32,06	-,15	,00	-,02
	Max	-,01	,02	,05	,05	,03	33,55	,20	,12	,02
	Means	-,0347	-,0005	,0286	,0286	,0025	32,9312	,0311	,0396	,0059
KBMI 4	Min	-,09	-,03	,00	-,02	-,01	27,44	-,02	,00	-,02
	Max	-,02	,03	,04	,03	,03	35,08	,92	,09	,02
	Means	-,0505	,0038	,0229	,0085	,0110	32,9688	,1324	,0370	,0028

Sumber: Data diolah (2022)

Data di atas menunjukkan bahwa nilai tertinggi *Allowance for Impairment Losses* berada pada Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti 4 (KBMI 4). Bank dengan portofolio kredit yang lebih berisiko cenderung memiliki tingkat

Allowance for Impairment Losses yang lebih tinggi. Selain itu, Bank yang termasuk dalam KBMI 4 memiliki Kebijakan pengelolaan risiko yang konservatif: Beberapa bank menerapkan kebijakan pengelolaan risiko yang lebih konservatif dengan mengalokasikan jumlah yang lebih besar untuk *Allowance for Impairment Losses* karena cenderung mengadopsi pendekatan kehati-hatian dalam menilai risiko kredit dan memperhitungkan potensi kerugian secara lebih luas, sehingga meningkatkan nilai *Allowance for Impairment Losses*.

Rata - rata nilai *NPL* tertinggi terjadi pada Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti 1 (KBMI 1) hal ini dapat disebabkan oleh risiko kredit yang berbeda, setiap Bank memiliki profil risiko kredit yang berbeda tergantung pada portofolio peminjamnya. Beberapa bank mungkin memiliki portofolio kredit yang lebih berisiko akibat pengelolaan risiko yang kurang efektif, Bank yang memiliki pengelolaan risiko yang kurang efektif atau kebijakan pemberian pinjaman yang longgar mungkin memiliki tingkat *NPL* yang lebih tinggi. Jika dibandingkan kelompok bank berdasarkan modal inti lainnya, Bank yang tergolong kelompok KBMI 1 memiliki kapasitas modal yang lebih rendah, Bank dengan modal inti yang lebih rendah cenderung memiliki ketersediaan modal yang lebih terbatas untuk menangani aset bermasalah atau *NPL*. Dalam situasi ini, tingkat *NPL* bank dapat menjadi lebih tinggi karena keterbatasan kemampuan bank untuk menangani kerugian kredit yang timbul.

Selisih nilai *Loan (ΔLOAN)* juga terjadi pada Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti 1 (KBMI 1). Hal ini dapat disebabkan oleh kebijakan pemberian pinjaman yang berbeda, terutama dalam hal risiko yang diterima dan ukuran kredit yang diberikan. Bank yang lebih agresif dalam memberikan pinjaman dengan risiko yang lebih tinggi akan cenderung memiliki *loan* yang lebih tinggi. Sementara itu, bank yang lebih konservatif dalam pemberian pinjaman atau menerapkan standar kredit yang lebih ketat akan memiliki *loan* yang lebih rendah.

Nilai *Charge Off* tertinggi berada pada kelompok Bank berdasarkan Modal Inti 1 (KBMI 1). Hal ini sejalan dengan Nilai selisih *Loan* dan *NonPerforming Loan* yang juga terjadi pada Bank KBMI 1. Jika Bank memiliki portofolio kredit dengan kualitas yang buruk, seperti tingkat non-performing loans (*NPL*) yang tinggi, maka kemungkinan tingkat *loan charge off* juga akan tinggi. *Loan charge off* terjadi ketika bank mengakui bahwa suatu pinjaman tidak dapat direalisasikan atau tidak mungkin dilunasi sepenuhnya. Faktor-faktor seperti ketidakmampuan peminjam untuk membayar pinjaman, kegagalan usaha, atau perubahan kondisi ekonomi yang merugikan dapat menyebabkan peningkatan *loan charge off*.

Berdasarkan data di atas, nilai *Discretionary Allowance For Impairment Losses* terjadi pada Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti 2 (KBMI 2) setelah itu nilai tertinggi terjadi pada Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti 3 (KBMI 3). Hal ini menunjukkan bahwa adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2021 yang mengelompokkan Bank berdasarkan modal inti memotivasi pihak manajemen untuk melakukan tindakan manajemen laba melalui pembentukan *Allowance for Impairment Losses* guna mempertahankan performa Bank sehingga dapat menarik minat investor yang nantinya akan menambah modal inti Bank. Selain itu keinginan untuk mempertahankan posisi Bank dalam pengelompokan Bank berdasarkan modal inti juga diindikasikan sebagai penyebab Nilai *Discretionary Allowance for Impairment Losses* tertinggi terjadi pada Bank KBMI menengah yaitu KBMI 2 dan KBMI 3.

Hasil dan Pembahasan

Terdapat perbedaan signifikan *Discretionary Allowance for Impairment Losses* sebelum dan setelah implementasi PSAK 71 pada setiap Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tingkat signifikansi 10% pada penelitian ini, diperoleh hasil bahwa seluruh hipotesis diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan *Discretionary Allowance for Impairment Losses* sebelum dan setelah implementasi PSAK 71 di setiap kategori Bank. Hasil Uji statistik hipotesis ditunjukkan pada tabel berikut ini

Tabel 3. Hasil Uji t

No	Hipotesis	t Tabel	t Hitung	Sig
1	Ha1: Terdapat perbedaan signifikan <i>Discretionary Allowance for Impairment Losses</i> sebelum dan setelah implementasi PSAK 71 pada perbankan kategori KBMI 1	1.29	1.858	.069
2	Ha2: Terdapat perbedaan signifikan <i>Discretionary Allowance for Impairment Losses</i> sebelum dan setelah implementasi PSAK 71 pada perbankan kategori KBMI 2	1.318	2.132	.056
3	Ha3: Terdapat perbedaan signifikan <i>Discretionary Allowance for Impairment Losses</i> sebelum dan setelah implementasi PSAK 71 pada perbankan kategori KBMI 3	1.318	1.848	.092
4	Ha4: Terdapat perbedaan signifikan <i>Discretionary Allowance for Impairment Losses</i> sebelum dan setelah implementasi PSAK 71 pada perbankan kategori KBMI 4	1.337	4.862	.002

Sumber: Data Diolah (2022)

Dari hasil pengujian hipotesis di atas, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada *Discretionary Allowance for Impairment Losses* sebelum dan setelah implementasi PSAK 71 pada setiap Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI). Hasil ini menunjukkan bahwa Ha1, Ha2, Ha3 dan Ha4 diterima. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perubahan metode perhitungan, Implementasi PSAK 71 memberikan pedoman yang lebih rinci tentang bagaimana bank harus menghitung *Allowance for Impairment Losses*. Sebelumnya, bank mungkin menggunakan metode yang berbeda atau kurang terstandarisasi dalam menentukan *Allowance for Impairment Losses*. Implementasi PSAK 71 dapat menyebabkan perubahan dalam metode perhitungan yang digunakan, termasuk faktor-faktor seperti penilaian risiko kredit, kualitas portofolio kredit, dan kondisi ekonomi yang harus dipertimbangkan. Perubahan ini dapat menyebabkan perbedaan *Allowance for Impairment Losses* sebelum dan sesudah implementasi PSAK 71.

Selain itu, peningkatan kualitas pengakuan kerugian kredit pada PSAK 71 mengharuskan bank untuk mengakui kerugian kredit dengan lebih tepat waktu dan memadai. Standar tersebut mendorong bank untuk melakukan penilaian risiko kredit yang lebih akurat, menggunakan data historis dan informasi aktual yang relevan, serta mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan perubahan regulasi. Implementasi PSAK 71 dapat menghasilkan peningkatan dalam pengakuan kerugian kredit, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi nilai *Allowance for Impairment Losses*. PSAK 71 juga merupakan penyesuaian terhadap praktik internasional, PSAK 71 didasarkan pada standar internasional, terutama International Financial Reporting Standard 9 (IFRS 9). Implementasi PSAK 71 bertujuan untuk meningkatkan kesesuaian akuntansi bank Indonesia dengan praktik internasional. Oleh karena itu, perbedaan *Allowance for Impairment Losses* sebelum dan setelah implementasi PSAK 71 dapat mencerminkan penyesuaian bank Indonesia terhadap praktik internasional yang lebih ketat dan terstandarisasi dalam mengakui dan mengalokasikan kerugian kredit.

Faktor lain yang dapat menyebabkan perbedaan *Allowance for Impairment Losses* adalah perubahan kondisi ekonomi dan risiko kredit. Selain perubahan akuntansi, perbedaan *Allowance for Impairment Losses* sebelum dan setelah implementasi PSAK 71 juga dapat tercermin dalam perubahan kondisi ekonomi dan risiko kredit yang dihadapi oleh bank. PSAK 71 mendorong pengakuan kerugian kredit secara lebih awal dan lebih tepat, dengan mempertimbangkan risiko kredit yang lebih komprehensif. Jika kondisi ekonomi memburuk atau risiko kredit meningkat setelah implementasi PSAK 71, bank mungkin perlu mengalokasikan *Allowance for Impairment Losses* yang lebih tinggi untuk mengantisipasi potensi kerugian yang lebih besar.

Dalam kombinasi, faktor-faktor di atas dapat menyebabkan perbedaan *Allowance for Impairment Losses (AFIL)* sebelum dan setelah implementasi PSAK 71. Implementasi PSAK 71 bertujuan untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan dan pengakuan risiko kredit bank, serta memastikan bahwa alokasi kerugian kredit yang memadai dilakukan. Namun tingginya kebutuhan *professional judgment* dalam penentuan *Allowance for Impairment Losses* oleh pihak manajemen Bank dapat menjadi celah bagi pihak manajemen untuk melakukan tindakan *earnings management* melalui pembentukan *Allowance for Impairment Losses*. Kondisi ini tercermin pada nilai *Discretionary Allowance for Impairment Losses* yang berbeda secara signifikan sebelum dan setelah Implementasi PSAK 71 pada setiap Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI).

Terdapat perbedaan signifikan *Discretionary Allowance for Impairment Losses* pada setiap kategori KBMI

Pengujian hipotesis kelima dalam penelitian ini menggunakan analisis varians (*ANOVA*) untuk menguji perbedaan rerata *Discretionary Allowance for Impairment Losses* antar Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI). Hasil pengujian hipotesis pada tingkat signifikansi 10% menunjukkan bahwa nilai F hitung > dari F tabel yaitu $2,578 > 2.119$ dengan nilai signifikansi 0,056. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rerata *Discretionary Allowance for Impairment Losses* antar KBMI seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Hasil Uji ANOVA

Hipotesis	F Tabel	F Hitung	Sig
Ha5: Terdapat perbedaan signifikan <i>Discretionary Allowance for Impairment Losses</i> pada setiap kategori KBMI	2.119	2.578	.056

Sumber: Data diolah (2022)

Perbedaan *Discretionary Allowance for Impairment Losses* antar KBMI dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kualitas asset, kualitas aset bank terutama portofolio kredit, dapat berbeda antara kelompok bank berdasarkan modal inti. Bank dengan modal inti yang lebih besar mungkin memiliki portofolio kredit yang lebih berkualitas atau lebih rendah risiko kredit. Hal ini dapat mempengaruhi risiko kredit, alokasi *Allowance for Impairment Losses* dan performa keuangan bank secara keseluruhan. Selain itu, modal inti bank dapat

mempengaruhi struktur pembiayaan bank, termasuk rasio utang terhadap ekuitas. Bank dengan modal inti yang lebih besar mungkin memiliki lebih banyak akses ke pembiayaan eksternal atau dapat mengandalkan pembiayaan internal yang lebih kuat. Ini dapat mempengaruhi kemampuan bank untuk mengelola risiko, pertumbuhan, dan kinerja keuangan secara keseluruhan. Kelompok bank berdasarkan modal inti yang berbeda dapat menghadapi tantangan yang berbeda dalam mempertahankan keberlanjutan modal dan stabilitas keuangan. Bank dengan modal inti yang lebih kecil mungkin menghadapi risiko modal yang lebih besar dan mungkin perlu mengambil langkah-langkah untuk memperkuat modal. Sebaliknya, bank dengan modal inti yang lebih besar mungkin lebih mampu memenuhi persyaratan modal yang diberlakukan oleh otoritas pengawas.

Situasi ini menyebabkan perbedaan *Discretionary Allowance for Impairment Losses* yang terjadi pada masing-masing kelompok Bank. Bank yang berada pada level menengah (KBMI 2 dan KBMI 3) dan level bawah (KBMI 1) menghadapi tekanan yang lebih besar untuk mempertahankan kredibilitasnya saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2021 diterbitkan. Bank akan berusaha memenuhi ekspektasi pasar terhadap kinerja keuangannya dalam upaya untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik. Laporan keuangan yang menunjukkan kinerja yang lebih baik dapat mempengaruhi harga saham bank. Bank dapat melakukan *earnings management* melalui pembentukan *Allowance for Impairment Losses* untuk menciptakan kesan kinerja yang lebih positif, yang dapat meningkatkan harga saham sebagai upaya meningkatkan modal inti Bank. Sedangkan nilai *Discretionary Allowance for Impairment Losses* pada Bank KBMI 4 menunjukkan nilai terendah dari keseluruhan KBMI. Bank dengan modal inti yang lebih besar cenderung memiliki ukuran dan skala operasional yang lebih besar. Hal ini dapat memberikan keuntungan dalam hal diversifikasi portofolio, akses ke sumber daya yang lebih besar, dan potensi pendapatan yang lebih tinggi sehingga motivasi manajemen untuk melakukan *earnings management* melalui pembentukan *Allowance for Impairment Losses* semakin rendah.

Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan industri juga dapat berperan dalam perbedaan *Discretionary Allowance for Impairment Losses* antara kelompok bank. Perubahan dalam kondisi ekonomi dapat mempengaruhi nilai *Allowance for Impairment Losses* pada bank. Jika bank beroperasi di lingkungan ekonomi yang tidak stabil seperti saat pandemic covid, Bank – Bank dengan portofolio kredit yang terdampak saat pandemic akan membentuk dana cadangan yang lebih besar. Hal ini juga akan memperbesar peluang terjadinya *earnings management* karena tingginya *professional judgement* dari pihak manajemen dalam pembentukan dana cadangan. Perbedaan *Discretionary Allowance for Impairment Losses* pada kelompok bank berdasarkan modal inti dapat dipengaruhi oleh kombinasi dari faktor-faktor di atas. Setiap bank memiliki profil risiko yang berbeda, kebijakan pengelolaan risiko yang berbeda, serta respon terhadap kondisi ekonomi yang berbeda. Oleh karena itu, tingkat *Discretionary Allowance for Impairment Losses* yang lebih tinggi pada kelompok bank tertentu dapat mencerminkan kebijakan internal bank tersebut dan kondisi kredit yang dihadapinya.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris atas perbedaan *Discretionary Allowance for Impairment Losses* sebelum dan setelah implementasi PSAK 71 di Indonesia pada setiap Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) serta perbedaan *Discretionary Allowance for Impairment Losses* antar Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan *Discretionary Allowance for Impairment Losses* sebelum dan setelah implementasi PSAK 71 pada setiap Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI). Implementasi PSAK 71 mendorong pengakuan kerugian kredit secara lebih awal dan lebih tepat, dengan mempertimbangkan risiko kredit yang lebih komprehensif sehingga mengharuskan pihak manajemen Bank membentuk dana cadangan (*Allowance for Impairment Losses*). Dalam proses pembentukan dana cadangan ini, *professional judgement* dari pihak manajemen semakin tinggi sehingga peluang untuk melakukan *earnings management* semakin besar.

Perbedaan yang signifikan juga ditemukan pada *Discretionary Allowance for Impairment Losses* antar Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) setelah implementasi PSAK 71. Bank yang berada pada level menengah (KBMI 2 dan KBMI 3) dan level bawah (KBMI 1) menghadapi tekanan yang lebih besar untuk mempertahankan kredibilitasnya saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2021 diterbitkan, sedangkan nilai *Discretionary Allowance for Impairment Losses* pada Bank KBMI 4 menunjukkan nilai terendah dari keseluruhan KBMI. Bank dengan modal inti yang lebih besar cenderung memiliki ukuran dan skala operasional yang lebih besar sehingga dapat memberikan keuntungan dalam hal diversifikasi portofolio, akses ke sumber daya yang lebih besar, dan potensi pendapatan yang lebih tinggi sehingga motivasi manajemen untuk melakukan *earnings management* melalui pembentukan *Allowance for Impairment Losses* semakin rendah.

Penelitian ini belum melibatkan faktor eksternal dalam pengukuran *Discretionary Allowance for Impairment Losses* sehingga komponen pengukuran hanya bersumber dari internal Bank, selain itu sebagian dari periode penelitian dilakukan pada masa pandemi sehingga hasil yang ditemukan memungkinkan untuk dipengaruhi faktor lain.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melibatkan faktor eksternal dalam pengukuran *discretionary allowance for impairment losses* sehingga nilai yang dihasilkan dapat lebih mencerminkan unsur *discretionary* dalam pembentukan *allowance for impairment losses*. Penelitian selanjutnya juga dapat dilakukan diluar masa pandemic untuk memperoleh hasil yang lebih akurat.

REFERENSI

- Arifullah, M. N. (2021). Pencadangan Piutang Pada Perusahaan Sub-Sektor Perbankan Di Indonesia: Implementasi Penerapan PSAK 71. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini*, 1-2.
- Beatty AL, Liao S (2014) Financial accounting in the banking industry: a review of the empirical literature. *J Account Econ* 58:339-383
- Beaver WH, Engel EE (1996) Discretionary behavior with respect to allowances for loan losses and the behavior of security prices. *J Account Econ* 22:177-206
- Beaver, W. H., & McNichols, M. F. (1998). The characteristics and valuation of loss reserves of property casualty insurers. *Review of Accounting Studies*, 3, 73-95.
- Beaver, William.H and E.E. Engel. 1996. "Discretionary behavior with respect to allowance for loan losses and the behavior of security prices". *Journal of Accounting and Economics*. Vol.22
- Beneish, M. D. (1997). Detecting GAAP violation: Implications for assessing earnings management among firms with extreme financial performance. *Journal of accounting and public policy*, 16(3), 271-309.
- Bushman, R. M., & Williams, C. D. (2015). Delayed expected loss recognition and the risk profile of banks. *Journal of Accounting Research*, 53(3), 511-553.
- Bushman, R., and C. Williams. 2012. Accounting discretion, loan loss provisioning, and discipline of banks' risk-taking. *Journal of Accounting & Economics* 54, 1-18.
- Chi, Q., & Li, W. (2017). Economic policy uncertainty, credit risks and banks' lending decisions: Evidence from Chinese commercial banks. *China journal of accounting research*, 10(1), 33-50.
- Collins, J., D. Shackelford, and J. Wahlen. 1995. Bank Differences in the Coordination of Regulatory Capital, Earnings, and Taxes. *Journal of Accounting Research* 33, 263-291
- Healy PM, Wahlen JM (1999) A review of the earnings management literature and its implications for standard setting. *Account Horiz* 13:365-383
- Husni, M., Apriliani, W. A., & Idayu, R. (2022). Analisis Penerapan Psak 71 Terkait Cadangan Kerugian Penurunan Nilai: Pada Perusahaan Sektor Perbankan BumN Yang Terdaftar i BEI. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*, 2(1), 62-81.
- Jensen, Michael C. dan William Meckling. 1976. "Theory of the Firm, Managerial Behavior, Agency, and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics* 3 (4):305-360.
- Jensen, Michael C. dan William Meckling. 1976. "Theory of the Firm, Managerial Behavior, Agency, and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics* 3 (4):305-360.
- Jin, J., Kanagaretnam, K., & Lobo, G. J. (2016). Discretion in bank loan loss allowance, risk taking and earnings management. *Accounting & Finance*
- Kanagaretnam K, Lobo GJ, Mathieu R (2003) Managerial incentives for income smoothing through bank loan loss provisions. *Rev Quant Finance Accoun* 1:63-80
- Kanagaretnam, K., G. Lobo, D. Yang. 2004. Joint tests of signaling and income smoothing through bank loan loss provisions. *Contemporary Accounting Research* 21, 843-884.
- Moyer, S. E. (1990). Capital adequacy ratio regulations and accounting choices in commercial banks. *Journal of accounting and economics*, 13(2), 123-154.
- Ng, J., Saffar, W., & Zhang, J. J. (2020). Policy uncertainty and loan loss provisions in the banking industry. *Review of Accounting Studies*, 1-52.
- Ozili, P. K., & Outa, E. (2017). Bank loan loss provisions research/ : A review. *Borsa Istanbul Review*, 17(3), 144-163.
- Puspita, M., Oktavia, R., & Putri, W. R. E. (2022). The Pandemic Impact on Interest Based Income by Category of Commercial Banks in Indonesian. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 22(14), 43-53.
- Putri, W. R. E. (2017). Analisis Kualitas Laba Sebelum dan Sesudah Diterapkan SAK Adopsi IFRS di Indonesia dan Implikasinya terhadap Reaksi Investor. *Jurnal Akuntansi dan keuangan*, 22(2), 107.
- Rakastina Putri, H., Oktavia, R., & Rizki Eka Putri, W. (2022). The Changes in Accounting Standard: Their Impact of Implementation Allowance Impairment Losses. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 22(8), 30-41.
- Rizal, P. A, dan Shauki, R. E. 2019. Motif dan Kendala Bank Melakukan Penerapan Dini PSAK 71 Terhadap CKPN Kredit. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 16, No. 1, h. 83-107.
- Scholes, M. S., Wilson, G. P., & Wolfson, M. A. (1990). Tax planning, regulatory capital planning, and financial reporting strategy for commercial banks. *The Review of Financial Studies*, 3(4), 625-650.

- Tran, D.V., Hassan, M.K. & Houston, R. Discretionary loan loss provision behavior in the US banking industry. *Rev Quant Finan Acc* 55, 605–645 (2020)
- Witjaksono, Armanto. 2017. Dampak ED PSAK 71 Instrumen Keuangan Terhadap Pedoman Akuntansi Perbankan Terkait Kredit. *Jurnal Online Insan Akuntan*. Vol.2, No.1
- Yusdika, A. I. (2021). Penerapan PSAK 71 pada Bidang Keuangan Perbankan Selama Pandemi COVID-19. *Jurnal Aplikasi Ekonomi, Akuntansi dan Bisnis*, 402-416.